



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Mei 2025/Khusus - Calon PN)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
**UNIT KERJA** : DINAS SOSIAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MARGA ZULKIFLI RAYES
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 1018109

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 422 m2/250 m2 di SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 6940 m2 di SUMBAWA, WARISAN Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 174.000.000

1. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 1.661.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 48.094.283

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 3.033.094.283

**III. HUTANG** Rp. 200.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.833.094.283

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**UNIT KERJA** : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HARI CAHYONO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 178513

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.150.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 293 m <sup>2</sup> /13.875 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 384 m <sup>2</sup> /55 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>182.500.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA/MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
2. MOTOR, HONDA VIJO2Q32LOA/T/SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000		
3. MOTOR, HONDA SCOOPY HONDA/F1CO2N46L2A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>82.750.000</b>
<b>D. SURAT BERTAHAGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>64.342.053</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.479.592.053</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>193.356.822</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.286.235.231</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**UNIT KERJA** : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IKA KURNIA MUSTIKA
2. Jabatan : PANITIA PENGADAAN BARANG JASA
3. NHK : 441357

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **2.957.220.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 301 m2/100 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/21 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 823 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, Rp. 164.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 401 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/400 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
7. Tanah Seluas 184 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 543.220.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **207.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **832.600.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	507.289.759
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	215.294.060
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.719.403.819
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.719.403.819

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**UNIT KERJA** : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SRI WARNIATI**
2. Jabatan : **PANITIA PENGADAAN BARANG JASA**
3. NHK : **461117**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>800.000.000</b>
1. Tanah Seluas 862 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/21 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/21 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>362.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOTOR, HONDA E1F02N11M2A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
4. MOTOR, HONDA ADV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000		
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>128.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>180.000.000</b>



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.470.000.000
III. HUTANG	Rp.	31.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.439.000.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**UNIT KERJA** : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FE MUHAMMAD SYAMSURRIDO BAR
2. Jabatan : PANITIA PENGADAAN BARANG JASA
3. NHK : 462101

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.379.124.241</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.379.124.241		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>127.547.563</b>
1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 124.216.063		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.331.500		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.707.432</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.512.379.236</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>541.598.225</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>970.781.011</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**UNIT KERJA** : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EKO PURNOMO
2. Jabatan : PANITIA PENGADAAN BARANG JASA
3. NHK : 634086

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>480.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>27.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA NF 125 SD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
2. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>15.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>522.000.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>20.515.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>501.485.000</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**UNIT KERJA** : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AGUS PRIANTO
2. Jabatan : PEJABAT/PEGAWAI UNIT KERJA LPSE
3. NHK : 788831

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>300.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/24 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>24.500.000</b>
1. MOTOR, VARIO HONDA VARIO 125 CBS 2025 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 24.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>14.852.256</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>339.352.256</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>82.354.907</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>256.997.349</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**UNIT KERJA** : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SAHWAN
2. Jabatan : PEJABAT/PEGAWAI UNIT KERJA LPSE
3. NHK : 449579

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>400.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/90 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>24.000.000</b>
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA SEON Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
3. MOTOR, HONDA 075 F1C02N46L0 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
4. MOTOR, HONDA GL200 SPORT (TIGER 2000) Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.815.158</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
Sub Total	<b>Rp.</b>	<b>426.815.158</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>121.094.248</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>305.720.910</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**UNIT KERJA** : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TAUFIQ HOLILI
2. Jabatan : PEJABAT/PEGAWAI UNIT KERJA LPSE
3. NHK : 1007090

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>375.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/58 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000		
2. Tanah Seluas 111 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>11.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA SCOOPY SPM R 2 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>13.049.818</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>399.049.818</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>397.264.257</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.785.561</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**UNIT KERJA** : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **INDAH AFRIANI**
2. Jabatan : **PEJABAT/PEGAWAI UNIT KERJA LPSE**
3. NHK : **1007139**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>180.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/46 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA Y1G02N02 L 0/SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.800.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>17.542.917</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>212.342.917</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>156.234.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>56.108.917</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.